

Menggerakkan Potensi Kebinekaan Nasional untuk Perbaikan Kualitas Pemilihan Umum

Ridwan

Tenaga Ahli Kelembagaan MPR RI

Pemerhati Demokrasi

email: ridwanbona15@gmail.com

Abstrak

Tatanan kehidupan demokratis mensyaratkan sirkulasi kekuasaan dan kepemimpinan secara berkala, yang secara umum disepakati dalam istilah pemilihan umum. Hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Bangsa Indonesia yang telah mengalami transisi demokrasi yang cukup panjang, tentu tidak dapat berbalik arah ataupun prustasi, sehingga kembali kepada otoritarianisme. Perbaikan kualitas pemilu harus terus menerus digiatkan pada seluruh level, dengan cara menggairahkan modal-modal sosial yang dimiliki. Wilayah yang sangat luas, penduduk yang banyak, harus dapat didorong untuk menjadi pilar perbaikan kualitas pemilihan umum.

Kata kunci: *Kebinekaan, Pemilihan Umum, Demokrasi*

Abstract

The order of democratic life requires the circulation of power and leadership on a regular basis, which is generally agreed upon in terms of elections. This is one way to go for a better nation life. Indonesian people who have undergone a long democratic transition, certainly can not reverse direction or prustasi, so back to otoritarianisme. Improving the quality of elections should be continuously intensified at all levels, by stimulating the social capital they possess. A vast territory, a large population, should be encouraged to be a pillar of improving the quality of elections.

Keywords: *Diversity, General Election, Democracy*

Pendahuluan

Sejarah kepemiluan Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi 11 (sebelas) kali terjadi pemilihan umum, sejak Indonesia merdeka. Pada 1955 pemilihan umum pertama dilakukan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante, di mana angkatan bersenjata dan kepolisian turut berpartisipasi. Sekitar 80 partai politik, organisasi massa, dan perorangan turut meramaikan pemilu pertama, yang dianggap sangat demokratis¹. Artinya bahwa sepuluh tahun setelah proklamasi baru dapat dilakukan pemilihan umum. Walaupun demikian, pemilu pertama ini hingga sekarang masih menjadi romantisme sebagai pemilu berkualitas tinggi, dengan angka partisipasi yang tinggi pula.

Setelah tahun 1955 pada era orde lama yang ditandai dengan jatuh bangun kabinet, kualitas pemilu mengalami penurunan, beriringan dengan kondisi keamanan dalam negeri yang mengalami penurunan². Kondisi demikian tentu saja dapat mengarah pada pengambil alihan peran legislatif ke tangan eksekutif, berujung pada kepemimpinan absolut. Inilah terlihat dalam kegagalan demokrasi liberal sehingga beralih menjadi demokrasi terpimpin³.

Cerita penurunan kualitas pemilihan umum terus berlanjut pasca runtuhnya orde lama yang digantikan oleh pemerintahan orde baru, yang awalnya diharapkan oleh masyarakat Indonesia dapat membawa iklim kondusif bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pemilu 1971 adalah edisi pertama pemilihan umum era orde baru, yang bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen⁴. Namun demikian, harapan besar itu menyimpang menjadi demokrasi terpimpin, menjadikan bangsa ini terjebak pada lubang yang sama.

¹ lihat <https://www.kaskus.co.id/thread/537df80f8c07e789328b457e/kenali-sejarah-bangsamu-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-1955-2014/>, diunduh pada 23 Mei 2017. Lihat pula Effendi, Egus, *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia*, (FIAT JUSTISIA, Vol.10 No.2, 2016)

² lihat <https://karw21anto.wordpress.com/tugas-2/semester-1/penyebab-jatuhnya-7-kabinet-di-indonesia/>, diunduh pada 23 Mei 2017

³ Lihat Kaban, Ramon, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia*, (PERPEKTIF, Vol.VII No.3, 2000) h. 158-169

⁴ Lihat <http://www.donisetayawan.com/pemilu-pada-orde-baru/>, diunduh pada 23 Mei 2017

Kualitas Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilu setidaknya berpedoman pada beberapa azas, diantaranya:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggara Pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efektifitas; dan
12. Efisiensi⁵.

Praktik penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sejatinya selalu berpedoman pada 12 norma di atas. Bagi masyarakat, 12 norma tersebut menjadi alat ukur dari kualitas penyelenggara pemilu, sekaligus kualitas pemilihan umum dan hasilnya. Namun demikian, sejak era reformasi angka golput atau tidak memilih mengalami kenaikan signifikan.

Tabel 1. Trend Golput Era Reformasi

NO	TAHUN	PERSENTASE
1	1999	6,4 %
2	2004	15,9 %
3	2009	29,1%

Data dielaborasi dari Bismar Arianto⁶

Tingkat golput yang cenderung naik secara signifikan sejak era reformasi dapat diduga disebabkan oleh ketidak patuhan terhadap norma-norma di atas, baik pada level penyelenggara pemilu, penguasa yang melakukan intervensi, maupun penegakan hukum yang tidak berjalan baik.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum#Latar_belakang, diunduh pada 23 Maret 2017

⁶ Arianto, B., *Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.,2011;1(1):51-60.

Belum lagi berbicara tentang politik uang dalam pemilihan umum pada semua jenjang : pilpres⁷, pileg, pilgub, pilbup, dan pilwali⁸. Penyakit ini juga menjangar hingga ke pemilihan kepala desa⁹. Praktik subhat dalam politik ini sangat massif, yang lambat laun menjadi kebenaran di masyarakat, bahwa pemilu maupun pilkada adalah "musim bagi-bagi uang".

Dalam kondisi demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menjadi rendah. Jabatan penyelenggara pemilu hanya menjadi prestise "*glamour*" yang tidak populis, atau dianggap intrumen berburu kekayaan segelintir orang. Tentu saja masih banyak insan penyelenggara pemilu dan penegak hukum yang baik, bersih, dan siap bekerja untuk kemaslahatan bersama. Disamping itu, menggairahkan kembali masyarakat dengan cara mendekati ruang-ruang terdalam mereka yang selama ini tidak disentuh, yaitu tradisi mereka.

Pendekatan Kultural untuk Perbaikan Kualitas Pemilu

Pendekatan kultural mungkin agak terdengar aneh karena yang paling sering dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu adalah pendekatan struktural, kekuasaan, juga politik. Padahal sejak lahir manusia telah berbekal nilai-nilai kultural, yang kemudian dikembangkan oleh komunitasnya, dengan berbagai bentuk praktik. Tulisan ini bermaksud menawarkan pendekatan kultural yang cukup banyak di Indonesia untuk memberi sumbangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Norma-norma penyelenggaraan pemilu yang telah disebutkan sebelumnya terlalu jauh dan begitu rumit dipahami oleh masyarakat Indonesia yang majemuk, bukan hanya tradisi tetapi juga tingkat keterpelajaran. Pendekatan kultural dalam konteks ini merupakan upaya menyampaikan norma-norma pemilu dalam tradisi-tradisi yang hidup di setiap etnik bangsa Indonesia.

Tawaran strategisnya adalah membuat kebijakan tentang pengenalan norma-norma kepiluan berdasarkan akar kultural

⁷ Hamidi, AJ., *Pemilu 2004 tidak bebas politik uang!: laporan pemantauan dana kampanye*, Transparancy International Indonesia; 2008.

⁸ Masduki ,T., *Pilkada Rawan Politik Uang*, (Artikel dalam Harian Kompas. 2005), 11.

⁹ Curran J, Morley D, Walkerdine V. Cultural studies and communications.

masing-masing etnik di Indonesia. Sedangkan secara taktis, pihak penyelenggara pemilu pada semua level harus dapat menyampaikan norma-norma kepemiluan berdasarkan kondisi sosial-budaya masyarakat. Selanjutnya adalah gerakan massifikasi pendekatan kultural kepemiluan secara nasional.

Penutup

Kualitas demokrasi kita akan sangat bergantung pada kualitas kepemiluan yang secara berkala dilakukan. Berbagai eksperimen terus dilakukan dalam rangka mencapai kualitas pemilu yang tinggi. Hal ini menandakan betapa strategisnya pelaksanaan pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga berbagai pendekatan mesti dilakukan, salah satunya memberdayakan potensi kebinekaan kita untuk perbaikan kualitas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto B. *Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu*. (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. 2011;1(1))
- Curran J, Morley D, Walkerdine V. *Cultural studies and communications*.
- Effendi A. *Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia*. (Fiat Justisia. 2017 Mar 21;10(2)).
- Hamidi AJ. *Pemilu 2004 tidak bebas politik uang!:* (laporan pemantauan dana kampanye. Transparency International Indonesia; 2008)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum#Latar_belakang, diunduh pada 23 Maret 2017
- <https://www.kaskus.co.id/thread/537df80f8c07e789328b457e/kenali-sejarah-bangsamu-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-1955-2014/>, diunduh pada 23 Mei 2017
- <https://karw21anto.wordpress.com/tugas-2/semester-1/penyebab-jatuhnya-7-kabinet-di-indonesia/>, diunduh pada 23 Mei 2017
- Lihat <http://www.donisetawan.com/pemilu-pada-orde-baru/>, diunduh pada 23 Mei 2017
- Kaban, Ramon, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia*, (PERPEKTIF, Vol.VII No.3, 2000)
- Masduki T. *Pilkadal Rawan Politik Uang*. (Artikel dalam Harian Kompas. 2005;11)